BAB V

PENUTUP

Bab ini merangkum kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Setelah menarik kesimpulan, penulis memberikan saran atas hasil penelitian yang dilakukan.

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis dapat disimpulkan bahwa efektivitas Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara sudah berjalan dengan efektif, hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan indikator-indikator penelitian sebagai berikut :

1. Faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi memegang peranan penting dalam Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara Komunikasi efektif dilakukan melalui sosialisasi. Meskipun sumber daya terbatas, keterlibatan Disdukcapil DKI Jakarta, Unit Pelaksana Teknis Disdukcapil, Lembaga Negara yang diberikan hak akses untuk pemanfaatan IKD, kecamatan, dan kelurahan inilah menjadi aspek kunci keberhasilan implementasi kebijakan. Disposisi pelaksana kebijakan tercermin dari tingginya komitmen serta tanggung jawab dalam proses pelaksanaan kebijakan IKD. Respon positif dari masyarakat menandakan adanya kebutuhan terutama keberadaan digital yang tidak lepas dari aspek kehidupan masyarakat saat ini. Dalam struktur birokrasi, Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara berperan penting sebagai membina dan mengawasi sesuai SOP. Secara keseluruhan implementasi kebijakan ini merepresentasikan upaya yang baik.
2. Pengukuran efektivitas kebijakan penyelenggaraan IKD dinilai dari 5 dimensi mulai dari pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, adanya perubahan nyata. Namun, sejauh ini masih dirasakan belum maksimal bahwa 2 dari 5 dimensi yang diteliti menunjukkan hasil yang kurang

efektif dengan persentase 60-40. Dua dimensi tersebut adalah pemahaman program beberapa masyarakat kurang memahami alur proses pengajuan dokumen IKD dan tercapainya tujuan manfaat seluruhnya dirasakan masyarakat belum merata seperti hanya mengaktivasi saja ketika ingin digunakan ada beberapa instansi yang masih proses kerja sama. Sedangkan tiga dimensi yang efektif adalah ketepatan sasaran peserta program seperti masyarakat Jakarta Timur khususnya yang sudah melakukan perekaman e-KTP, ketepatan waktu sesuai dengan perkiraan dari SOP pedoman pelayanan IKD di Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara baik dari segi aktivasi maupun mengajukan dokumen kependudukan dan adanya perubahan nyata khususnya dalam hal verifikasi tiket kereta serta pesawat, pembayaran samsat, pembukaan rekening Bank Jatim, DKI, BNI, serta BRI.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh beberapa saran dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Pertama, perlu adanya peningkatan koordinasi dan komunikasi antara Sudin Dukcapil Jakarta Utara, sektor Dukcapil Kecamatan Cilincing, satpel Kelurahan Sukapura, dan masyarakat. Sosialisasi atau jemput bola lebih intensif dan pemberian informasi lebih mendetail terkait proses pengajuan dokumen dan instansi yang sudah bisa menggunakan IKD langkah ini sangat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan. Selain itu, perlu memastikan masyarakat yang mengikuti sosialisasi atau jemput bola diwajibkan agar menggunakan IKD sebagai transaksi pelayanan bersama instansi yang sudah bekerja sama atau mengajukan dokumen dengan IKD untuk dapat mengukur pemahaman masyarakat terhadap IKD agar tidak hanya aktivasi saja tetapi dipergunakan dengan semestinya.

Kedua, perlu ada ketetapan di Sudin Dukcapil Jakarta Timur tahun 2024 diwajibkan target 25% aktivasi IKD bagi yang sudah perekaman e-KTP harus diselesaikan. Berdasarkan pada tanggal 22 September 2024 sudah mencapai 17,04% yang mengaktivasi IKD. Diperlukan pula partisipasi pegawai Sudin Dukcapil Jakarta Utara, Kecamatan Cilincing dan Kelurahan Sukapura agar mencapai kekurangannya

7,96% sebagai bukti pegawai bertanggung jawab dan memiliki komitmen tinggi untuk pencapaian instansi. Pada tahun 2025 target aktivasi IKD harus ditingkatkan menjadi 50% atau 75%. Hal ini didukung oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri selaku pembuat kebijakan agar memperkuat kerja sama antar instansi yang memanfaatkan IKD sebagai layanan publik untuk mendorong masyarakat mengaktivasi IKD.